



RENCANA KERJA
(RENUA) PERUBAHAN
TAHUN 2022

SEKRETARIAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	39
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	44
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	44
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	46
3.3. Program dan Kegiatan	53
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	58
BAB V PENUTUP	82

DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal.
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya dan Capaian Renstra s/d Tahun 2021	6
2.2	Realisasi Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021	24
2.3	Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020	33
3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022	50
4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SETDA Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (Sebelum Perubahan)	59
4.2	Rumusan Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah, merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana Kerja Perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, disamping juga berpedoman pada Rencana Strategis, RPJMD dan RPJPD.

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 disusun berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2017- 2022. Dengan adanya acuan di atas, perubahan rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Rencana Kerja Perubahan diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Perubahan Kota Tasikmalaya Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Perubahan SETDA Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 273);
- i. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
- j. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan;
- k. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);

- l. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
- m. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 3);
- n. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48);
- o. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 54);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 ini adalah:

- a. Merupakan suatu dokumen perubahan perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam merencanakan perubahan.
- b. Merupakan suatu alat untuk mengukur kinerja instansi yang efektif, berkelanjutan.
- c. Merupakan pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilaksanakan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, tugas pokok Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya adalah membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pencapaian target kinerja dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator dengan target kinerja sebagai instrumen penilaian.

Evaluasi pelaksanaan Renja SETDA dan capaian renstra sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya
Dan Capaian Renstra s/d Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (tahun Berjalan/n-1)						
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tahun 2022 (n-1)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000					107,68			100					
4							107,68			100					
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori A (80)	Kategori BB (75)	Kategori A (81,81)	126	Kategori BB (75)	Kategori BB (75)	100		
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	1 Dok	1Dok	167	1 Dok	1 Dok	100		
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	1 Dok	100	
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	201	1		Jumlah Dokumen Rencana Strategis	1 Dok		-	-	1 Dok	1 Dok	100	
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	201	1		Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah tingkat daerah, provinsi dan pusat	12 Dok		6 Dok	6 Dok	100	6 Dok	6 Dok	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	1 Dok	100	
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	201	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	2 Dok	1 Dok	3 Dok	300	1 Dok	1 Dok	100	
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	201	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	1 Dok	100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	201	5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	2 Dok		1 Dok	3 Dok	300	1 Dok	1 Dok	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	201			Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dok		2 Dok	2 Dok	100	2 Dok	2 Dok	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	2 Dok		1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	1 Dok	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	201	6		Jumlah Dokumen LPPD	2 Dok		1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	1 Dok	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	201			Jumlah Data Kinerja Sekretariat Daerah	12 Dok		6 Dok	6 Dok	100	6 Dok	6 Dok	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	201	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Triwulanan	8 Dok		4 Dok	4 Dok	100	4 Dok	4 Dok	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	201	7		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	2 Dok		1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	1 Dok	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	201	7		Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah	2 Dok		1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	1 Dok	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan	17 Dok		5 Dok	5 Dok	105	5 Dok	5 Dok	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	28 Bulan		14 Bulan	14 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	202	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan yang Diverifikasi	2000 Dok		800 Dok	959 Dok	120	800 Dok	800 Dok	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	202	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 Dok		1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	1 Dok	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	202	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3 Dok		2 Dok	2 Dok	100	2 Dok	2 Dok	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	202	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	16 Dok		84 Dok	87 Dok	104	18 Dok	18 Dok	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Capaian IKM Perangkat Daerah	Kategori 77-88 (Baik)		Kategori 77-88 (Baik)	Kategori (Baik) 79,06	94	Kategori 77-88 (Baik)	Kategori 77-88 (Baik)	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	12 Dok		6 Dok	4 Dok	100	6 Dok	6 Dok	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	203	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang diamankan	78 Unit		39 Unit	-		2 Unit	2 Unit	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	203	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang semesteran dan akhir tahun	2 Dok		2 Dok	2 Dok	100	2 Dok	2 Dok	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	203	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen KIB dan KIR	4 Dok		2 Dok	2 Dok	100	2 Dok	2 Dok	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %		100 %	100%	105	100 %	100 %	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	205	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Mesin/Kartu Absensi	2 Unit		2 Unit	3 Unit	150	2 Unit	2 Unit	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	280 Stel		288 Stel	287 Stel	100	288 Stel	288 Stel	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	205	2		Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	150 Stel		72 Stel	69 Stel	96	72 Stel	72 Stel	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	205	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kepegawaian yang Diselenggarakan	14 Kali		4 Kali	3 Kali	75	4 Kali	4 Kali	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		10 Orang	-		10 Orang	10 Orang	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum	100 %		100 %	100%	97	100 %	100 %	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	4332 Buah		2166 Buah	2165,88 Buah	100	1518 Buah	1518 Buah	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	3082 Buah		1541 Buah	1540,5 Buah	100	1 Unit	1 Unit	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	206	3		Jumlah Unit Peralatan Rumah Tangga.	6 Unit		3 Unit	3 Unit	100	2849 Buah	2849 Buah	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	40 Paket		20 Paket	20 Paket	100	20 Paket	20 Paket	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	32786 Buah		16393 Buah	16393,25 Buah	100	15342 Buah	15342 Buah	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	206	5		Jumlah Penggandaan	132336 Lembar		66168 Lembar	66168 Lembar	100	120936 Lembar	120936 Lembar	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	206	5		Jumlah Penjilidan	360 Buku		180 Buku	180 Buku	100	200 Buah	200 Buah	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	24 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
							Jumlah Iklan Media Massa E-Paper	24 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100	-	-	-
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	206	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah alat tulis kantor dan bahan/material lainnya	8696 Buah		4348 Buah	4384 Buah	101	1013 Buah	1013 Buah	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	206	7		Jumlah Kertas dan Cover	-		-	-	-	1230 Rim	1230 Rim	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	206	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minum Rapat dan Jamuan Tamu	383547 Porsi		363861 Porsi	436861,25 Porsi	120	23640 Porsi	23640 Porsi	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	206	8		Jumlah Makan dan Minum Rapat dan Jamuan Tamu.	-		-	-	-	25120 Dus	25120 Dus	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1600 Dokumen		800 Dokumen	342 Dokumen	43	800 Dok	800 Dok	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Arsip Terjaga	80 ML		40 ML	40 ML	100	40 ML	40 ML	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen yang Diarsipkan	2040 Dokumen		2000 Dokumen	2000 Dokumen	100	2000 Dok	2000 Dok	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Aplikasi.	4 Aplikasi		2 Aplikasi	2 Aplikasi	100	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengelolaan Website/Aplikasi/Sistem Informasi	5 Aplikasi		2 Aplikasi	2 Aplikasi	100	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	30 Unit		15 Unit	15 Unit	115	15 Unit	15 Unit	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	207	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebelair Kantor	62 Unit		124 Unit	160 Unit	129	21 Unit	21 Unit	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	18 Unit		9 Unit	9 Unit	100	1 Paket	1 Paket	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100%	100	100 %	100 %	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Perangko, Materai, dan Buku Cek	3720 Buah		1720 Buah	1720 Buah	100	273 Buah	273 Buah	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa telepon, air, listrik dan jasa layanan internet	24 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	208	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket		12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Jasa Pelayanan Umum Kantor	24 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100
							Jumlah Petugas Kebersihan	64 Orang		12 Bulan	12 Bulan	100	-	-	-
							Jumlah Perlengkapan Kebersihan	5760 Buah		2880 Buah	2880 Buah	100	-	-	-
							Jumlah Petugas Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor	36 Orang		12 Bulan	12 Bulan	100	-	-	-
							Jumlah Petugas Pengemudi	20 Orang		12 Bulan	12 Bulan	100	-	-	-
							Jumlah Petugas Resepsionis	2 Orang		12 Bulan	12 Bulan	100	-	-	-
							Jumlah Waktu penyediaan jasa peningkatan pelayanan pegawai	24 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100	-	-	-
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Frekwensi Pemeliharaan Barang Milik Daerah	992 Kali		496 Kali	516 Kali	100	496 Kali	496 Kali	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah frekuensi pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	48 Kali		24 Kali	24 Kali	100	24 Kali	24 Kali	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah frekuensi pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional/lapangan	236 Kali		118 Kali	117,5 Kali	100	12 Bulan	12 Bulan	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	209	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Waktu Pemeliharaan Mebelair Kantor	24 Kali		12 Kali	12 Kali	100	12 Bulan	12 Bulan	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8 Paket		4 Paket	4 Paket	100	12 Bulan	12 Bulan	100
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	434 Kali		217 Kali	217,25 Kali	100	-	-	-
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	282 Kali		141 Kali	141,25 Kali	100	12 Bulan	12 Bulan	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	211		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %		100 %	100%	300	100 %	100 %	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	211	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	28 Bulan		14 Bulan	14 Bulan	100	14 Bulan	14 Bulan	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	211	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Dan Atribut	116 Stel		58 Stel	58 Stel	100	48 Stel	48 Stel	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	211	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	24 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	212		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %		100 %	100%	50	100 %	100 %	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	212	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah jasa sewa rumah jabatan Kepala Daerah	24 Bulan		12 Bulan	5 Bulan	42	12 Bulan	12 Bulan	100
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah jasa sewa rumah jabatan Wakil Kepala Daerah	24 Bulan		12 Bulan	7 Bulan	58			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	213		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	20 Dok		17 Dok	12 Dok	100	17 Dok	17 Dok	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	213	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Informasi Jabatan dan Syarat Jabatannya	1 Dok		1 Dok	1 Dok	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	213	1		Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	2 Dok		-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100
							Jumlah Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	2 Dok		1 Dok	1 Dok	100	-	-	-
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	213	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Hasil Suvey Indeks Kepuasan Masyarakat	2 Dok		1 Dok	1 Dok	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
							Jumlah Dokumen Reviu Peta Proses Bisnis	2 Dok		1 Dok	1 Dok	100	-	-	-
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	213	2		Jumlah Perangkat Daerah yang Dibina.	74 PD		37 PD	37 PD	100	36 PD	36 PD	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	213	2		Jumlah Perangkat Daerah yang Dibina Ketatalaksanaannya	74 PD		37 PD	37 PD	100	36 PD	36 PD	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	213	2		Jumlah Perangkat Daerah yang Dibina Dalam Penyusunan SOP	74 PD		37 PD	37 PD	100	36 PD	36 PD	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	213	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Laporan Perkembangan Reformasi Birokrasi	2 Dok		1 Dok	1 Dok	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	213	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Perangkat daerah yang Dimonitoring dan Dievaluasi Pelayanan Publiknya	2 Dok		1 Dok	1 Dok	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	213	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah PD yang dibina SAKIP	2 Dok		1 Dok	1 Dok	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	213	5		Jumlah Perangkat Daerah yang Dibina (SAKIP)	74 PD		37 PD	37 PD	100	37 PD	37 PD	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	214		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah kunjungan kerja/ inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.	188 Hari Kegiatan		94 Hari Kegiatan	115 Hari Kegiatan	122	12 kali	12 kali	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	214	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah kegiatan pendampingan kunjungan kerja/ inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	188 Hari Kegiatan		94 Hari Kegiatan	115 Hari Kegiatan	122	36 kali	36 kali	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	214		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional.	24 kali		12 kali	9 Kali	75	94 Hari Kegiatan	94 Hari Kegiatan	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	214	1		Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional	24 Kali		12 Kali	9 Kali	75	12 kali	12 kali	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	214		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Penyusunan Data Publikasi Dan Informasi Pimpinan	24 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	75	94 Hari Kegiatan	94 Hari Kegiatan	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	214	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Publikasi dan Informasi Kegiatan Sekretariat Daerah	48 Dok		24 Dok	24 Dok	100	24 Dokumen	24 Dokumen	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	214		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Dokumentasi Kegiatan Pimpinan dan Sekretaris Daerah.	24 Dok		12 Dok	12 Dok	100	12 Dok	12 Dok	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	214	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumentasi Kegiatan Pimpinan dan Sekretaris Daerah	24 Dok		12 Dok	12 Dok	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik	100 %		100 %	100%	100	100 %	100 %	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	201		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang dibina	158 Kecamatan dan Kelurahan		79 Kecamatan dan Kelurahan	79 Kecamatan dan Kelurahan	100	79 Kecamatan dan Kelurahan	79 Kecamatan dan Kelurahan	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	201	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Proposal yang di Verifikasi	16 Dok		8 Dok	8 Dok	100	5 Dokumen	5 Dokumen	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	201	1		Jumlah Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6 Kali		3 Kali	3 Kali	100	4 Kali	4 Kali	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Implementasi Koordinasi dan Kebijakan Pemerintahan	100 %		100%	100%	100	100 %	100 %	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	201		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen pengelolaan administrasi kewilayahan	4 Dok		2 Dok	2 Dok	100	2 Dok	2 Dok	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	201	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Pembakuan Nama Rupabumi	2 Dok		1 Dok			1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	201	2		Jumlah Dokumen Penegasan Batas Wilayah	2 Dok		1 Dok	1 Dok	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	201	2		Jumlah Kelurahan yang dievaluasi perkembangannya	138 Kelurahan		69 Kelurahan	69 Kelurahan	100	69 Kelurahan	69 Kelurahan	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	201	2		Jumlah Kecamatan Yang dinilai	20 Kecamatan		10 Kecamatan			10 Kecamatan	10 Kecamatan	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	201	2		Jumlah Perangkat Kecamatan dan Kelurahan Yang Dibina	158 Kecamatan		79 Kecamatan			79 Orang	79 Orang	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	201			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dok		2 Dok	2 Dok	100	2 Dok	2 Dok	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	201	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Memori Serah Terima Jabatan Wali Kota Tasikmalaya	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100
							Jumlah Dokumen Proposal yang di Verifikasi	16 Dok		8 Dok	8 Dok	100	-	-	-
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	201	3		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya	2 Dok		1 Dok	1 Dok	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	201	3		Jumlah Dokumen Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kota Tasikmalaya	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	201	3		Jumlah Dokumen Penyusunan LKPJ Kota Tasikmalaya	2 Dok		1 Dok	1 Dok	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	202		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	192 Kali		33 Kali	35 Kali	125	90 Kali	90 Kali	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	202	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kafilah Sleksi Tilawatil Qur'an (STQ)/Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) yang di bina	200 Orang		-	-	-	100 Orang	100 Orang	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	202	1		Jumlah penerima Hibah Keagamaan	400 Lembaga		-	-	-	200 Lembaga	200 Lembaga	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	202	1		Jumlah Kegiatan Jum'at Keliling, Gerakan Shubuh Berjama'ah dan Silaturahmi dengan Masyarakat dalam upaya Pembinaan Keagamaan	160 Kali		20 Kali	20 Kali	100	80 Kali	80 Kali	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	202	1		Jumlah Kegiatan Safari Ramadhan Tingkat Kota Tasikmalaya	40 Kali		-	-	-	20 Kali	20 Kali	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	202	1		Jumlah Monitoring dan Evaluasi terhadap Lembaga/Kelompok Masyarakat yang Menyelenggarakan Kegiatan Maghrib Mengaji (1069 DKM)	2 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	202	1		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sinergitas Keagamaan	2 Tahun		2 Kali	4 Kali	200	12 Kali	12 Kali	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	202	1		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan	300 Penerima		2 Keg	3 Keg	150	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	202	1		Jumlah Pelaksanaan Siraman Rohani bagi ASN yang berada di 6 Perangkat Daerah	536 Kali		10 Kali	10 Kali	100	53 Kali	53 Kali	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	202	1		Jumlah Pembinaan, Sosialisasi dan Monev pada Penegakan Aksi Tata Nilai	4 Kali		1 Kali	1 Kali	100	6 Kali	6 Kali	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	202	1		Jumlah Penerima Penghargaan Bagi Masyarakat Berprestasi di Bidang Keagamaan	200 Orang		268 Orang	268 Orang	100	100 Orang	100 Orang	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	202	1		Jumlah Pengelolaan Dokumen Hibah di Bagian Kesra	2 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
							Jumlah Penerimaan Bantuan Hibah di Bagian Kesra	300 Penerima		150 Penerima	142 Penerima	95	-	-	-
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	202	1		Jumlah Pesantren yang mengikuti Kegiatan Hari Santri	500 Pesantren		-	-	-	250 Pesantren	250 Pesantren	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	202	1		Jumlah Peserta Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)/Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kota	400 Orang		200 Orang	200 Orang	100	100 Orang	100 Orang	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	202	1		Jumlah Peserta Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) /Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Jawa Barat	200 Orang		100 Orang	100 Orang	100	200 Orang	200 Orang	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	202	1		Pengadaan Aplikasi Magrib Mengaji	90418 Paket		-	-	-	1 Paket	1 Paket	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	202		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas, Evaluasi dan Koordinasi Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Sosial	337 Kali		3 Kali	3 Kali	100	90 Kali	90 Kali	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	202	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Kesejahteraan Sosial di Kota Tasikmalaya	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	202	2		Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Penguatan Kelembagaan TP-UKS dan Tim Pembina Sekolah Sehat di Kota Tasikmalaya	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	202	2		Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Kota Tasikmalaya	2 Dokumen		-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	202	2		Jumlah Dokumen bahan Kebijakan Program Hibah dan Bansos Pemerintah Kota Tasikmalaya	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	202	2		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Masalah Kesejahteraan Sosial	4 Dokumen		-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	202	2		Jumlah Rapat Koordinasi Kesejahteraan Sosial dan Konsultasi Kesejahteraan Sosial	2 Dokumen		-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	202		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas, Evaluasi dan Koordinasi Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat	64 Kali		11 Kali	3 Kali	27	90 Kali	90 Kali	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	202	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Fasilitas, Evaluasi dan Koordinasi Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat	6 Kali		3 Kali	3 Kali	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	202	3		Jumlah Dokumen Kegiatan Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) Tingkat Kota	2 Keg		-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	202	2		Jumlah Dokumen Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	600 Orang		-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	202		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Peserta Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat	276 Peserta		138 Kali	138 Kali	100	90 Kali	90 Kali	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	202	3		Jumlah Dokumen Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kota	138 LPM		69 LPM	69 LPM	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	202	3		Jumlah Dokumen Pembinaan Program Pemberdayaan Kemandirian Kelurahan/Gema Madani	138 TPK		69 TPK	69 TPK	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	202		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat	2 Dok		1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	1 Dok	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	202	3		Jumlah Dokumen Monev Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal	2 Keg		1 Keg	1 Keg	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Produk Hukum Daerah yang Diundangkan	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	203		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah	1240 Dok		620 Dok	851 Dok	131	620 Dok	620 Dok	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	203	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Dokumen Keputusan Walikota	1000 Keputusan Wali Kota		500 Keputusan Wali Kota	798 Keputusan Wali Kota	160	500 Kepwal	500 Kepwal	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	203	1		Jumlah Dokumen Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya	18 Rancangan Peraturan Daerah		8 Rancangan Peraturan Daerah	12 Rancangan Peraturan Daerah	150	8 Perda	8 Perda	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	203	1		Jumlah Dokumen Peraturan Walikota Tasikmalaya	100 Peraturan Wali Kota		50 Peraturan Wali Kota	41 Peraturan Wali Kota	82	50 Perwal	50 Perwal	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	203			Jumlah Perkara yang ditangani	20 Perkara		10 Perkara	41 Perkara	410	620 Dok	620 Dok	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	203	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Perkara Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang ditangani	10 Perkara		5 Perkara	5 Perkara	100	5 perkara	5 perkara	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	203	2		Jumlah perkara yang ditangani pada bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota tasikmalaya	10 Perkara		5 Perkara	36 Perkara	720	25 perkara	25 perkara	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	203			Jumlah Peserta sosialisasi dan pembinaan	1672 Peserta		730 Peserta	300 Peserta	41	620 Dok	620 Dok	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	203	2		Jumlah Peserta Desiminasi Ranham						160 Peserta	160 Peserta	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	203	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pusat dan Produk Hukum Daerah	12- 600 Lokasi-Orang		6 - 300 Lokasi- Orang	6 - 300 Lokasi- Orang	100	300 orang	300 orang	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	203	3		Jumlah Peserta Pembinaan Pengelola Produk Hukum	250 Orang		125 Orang	0 Orang	-	75 orang	75 orang	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	203	3		Jumlah Peserta Sosialisasi (DBHCHT)	-		-	-	-	240 orang	240 orang	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	203		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah produk hukum yang didokumentasikan	120 Produk Hukum Daerah		60 Produk Hukum Daerah	36 Produk Hukum Daerah	60	60 Produk Hukum Daerah	60 Produk Hukum Daerah	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	203	3		Jumlah Produk Hukum yang disosialisasikan, dan dipublikasikan, serta didokumentasikan	120 Produk Hukum Daerah		60 Produk Hukum Daerah	36 Produk Hukum Daerah	60	60 produk hukum	60 produk hukum	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	203		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Media Informasi Hukum	6 Paket		3 Paket	3 Paket	100	3 Paket	3 Paket	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	203	3		Jumlah Media Informasi Hukum	6 Paket		3 Paket	3 Paket	100	3 Peket	3 Peket	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	203	3		Jumlah Publikasi/ Jasa Iklan						6 Paket	6 Paket	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	204		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	50 Dok		17 Dok	34 Dok	227	5 Kali	5 Kali	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	204	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah naskah kerjasama Dalam Negeri yang dilaksanakan	50 Dok		15 Dok	34 Dok	227	17 Dokumen	17 Dokumen	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	2	204			Jumlah koordinasi antar Pemerintah Daerah	109 Kali		5 Kali	5 Kali	75	17 Dokumen	17 Dokumen	100
							Jumlah Kegiatan rangkaian APEKSI	8 Keg		4 Kgt	4 Kgt	100	15 Okumen	15 Okumen	100
							Jumlah Kegiatan rangkaian FORSESDASI	102 Kali		2 Kali	1 Kali	50	2 Kali	2 Kali	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Implementasi Koordinasi dan Kebijakan Perekonomian	100 %		100 %	100 %	106	100 %	100 %	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	3	201		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah BUMD yang di Evaluasi.	2 BUMD		1 BUMD	1 BUMD	100	1 BUMD	1 BUMD	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	3	201	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD dan BLUD yang dimonitoring dan di Evaluasi	2 BUMD		1 BUMD	1 BUMD	100	25 BUMD dan BLUD	25 BUMD dan BLUD	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	3	201		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah pangkalan LPG 3 Kg yang dimonitoring dan dievaluasi.	20 Pangkalan LPG		10 Pangkalan LPG	10 Pangkalan LPG	100	10 Pangkalan LPG	10 Pangkalan LPG	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	3	201	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah pangkalan LPG 3 Kg yang diMonitoring dan Di Evaluasi	40 Pangkalan LPG		10 Pangkalan LPG	10 Pangkalan LPG	100	10 Pangkalan LPG	10 Pangkalan LPG	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	3	201		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Daerah	36 Dok		18 Dok	21 Dok	108	18 Dok	18 Dok	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	3	201	2		Jumlah laporan hasil koordinasi percepatan akses keuangan daerah	2 Dok		1 Dok	1 Dok	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	3	201	2		Jumlah Rekomendasi Peningkatan Daya Saing Daerah Kota Tasikmalaya	2 Dok		1 Dok	2 Dok	200	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	3	201	2		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	24 Dok		12 Dok	12 Dok	100	6 Dokumen	6 Dokumen	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	3	201	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat	4 Dok		2 Dok	1 Dok	50	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	3	201	3		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL	8 Dok		4 Dok	4 Dok	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	3	201	3		Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan program wira usaha baru	2 Dok		1 Dok	1 Dok	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	3	204		Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	3 Dok		-	-	-	3 Dok	3 Dok	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	3	204	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 Dok		-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	3	204	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	1 Dok		-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	3	204	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 Dok		-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Implementasi Koordinasi dan Kebijakan Pembangunan	100 %		100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	3	202		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	8 Kali		4 Kali	4 Kali	100	4 Kali	4 Kali	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	3	202	1	Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Analisis Standar Biaya	4 Dok		1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	1 Dok	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	3	202	1		Jumlah Dokumen Standar Biaya Belanja Daerah	4 Dok		2 Dok	2 Dok	100	2 Dok	2 Dok	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	3	202	1		Jumlah Pelaksanaan Asisten RKA/DPA	8 Kali		4 Kali	4 Kali	100	4 Kali	4 Kali	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Optimalisasi Percepatan Pembangunan Daerah	100 %		100 %	100 %	102	100 %	100 %	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	3	202		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Kali		2 Kali	2 Kali	105	2 Kali	2 Kali	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	3	202	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Evaluasi Program Pembangunan	24 Dok		12 Dok	12 Dok	100	12 Dok	12 Dok	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	3	202	2		Jumlah Monitoring Kegiatan Pembangunan	100 Keg		50 Keg	55 Keg	110	50 Keg	50 Keg	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	3	202		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Pengelolaan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	6 Kali		3 Kali	3 Kali	100	3 Kali	3 Kali	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	3	202	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	24 Dok		12 Dok	12 Dok	100	12 Dok	12 Dok	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	3	202	3		Jumlah Peresmian Hasil Pembangunan	8 Kali		1 Kali	1 Kali	100	4 Kali	4 Kali	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	3	202	3		Jumlah Pelaksanaan Exspose Kinerja Pembangunan	12 Kali		3 Kali	3 Kali	100	4 Kali	4 Kali	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 %		100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	3	203		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.	Jumlah Realisasi Pengadaan Barang dan jasa terhadap jumlah Usulan	1000 Paket		500 Paket	500 Paket	100	500 Paket	500 Paket	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	3	203	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	1000 Dok		500 Dok	500 Dok	100	500 Paket	500 Paket	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	3	203	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Paket Pengadaan Barang Jasa yang dilakukan melalui SPSE	37 PD		37 PD	37 PD	100	37 Paket	37 Paket	100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	3	203	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dan diadvokasi	400 Orang		200 Orang	200 Orang	100	37 PD	37 PD	100

Berdasarkan Tabel 2.1. di atas, dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya melaksanakan 3 (tiga) program, 19 (sembilan belas) kegiatan, dan 75 (tujuh puluh lima) sub kegiatan pada APBD murni Tahun Anggaran 2021, yaitu Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan 4 (empat) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan, Program Perekonomian dan Pembangunan dengan 3 (tiga) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 12 (dua belas) kegiatan dan 54 (lima puluh empat) sub kegiatan.

Kemudian pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 terdapat 4 (empat) sub kegiatan yang tidak dilaksanakan dikarenakan adanya penyesuaian anggaran (*refocusing*) untuk penanganan pandemi Covid-19, yaitu:

- a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri pada Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah.
 - d. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama pada Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah.
2. Terdapat 3 (tiga) kegiatan yang tidak mencapai target Realisasi yang direncanakan, yaitu:
 - a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dimana target Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tidak tercapai dikarenakan target yang ditetapkan tidak dapat dihitung secara akurat dan hanya bersifat prediktif dan adanya aturan pembatasan perjalanan dinas.
 - b. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, dimana target Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang memfasilitasi jasa sewa rumah jabatan Kepala Daerah tidak tercapai dikarenakan adanya kekosongan jabatan Wali Kota yang kemudian diisi Plt. Wali Kota.

- c. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, dimana target Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang memfasilitasi jasa sewa rumah jabatan Wakil Kepala Daerah tidak tercapai disebabkan adanya kekosongan jabatan Wakil Wali Kota dikarenakan Plt. Wali Kota (yang dijabat oleh Wakil Wali Kota) dilantik menjadi Wali Kota.
 - d. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dimana realisasi Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan dan Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan tidak tercapai dikarenakan adanya pengurangan/ pembatasan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
3. Terdapat 9 (Sembilan) kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, yaitu :
- a. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - d. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - e. Kegiatan Penataan Organisasi.
 - f. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan.
 - g. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian.
 - h. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.
 - i. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang pencapaiannya melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, dari hasil diatas ada yang melebihi dari target yang telah direncanakan, yaitu:
- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - e. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.
 - f. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.
 - g. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah.

Pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021 pada Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya tidak lepas dari dukungan anggaran, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun 2021.

Pada APBD murni tahun anggaran 2021 Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.83.715.987.000,00 (delapan puluh tiga miliar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan pada APBD perubahan tahun anggaran 2021 terdapat pengurangan angka menjadi Rp. 73.462.972.501,00 (tujuh puluh tiga miliar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus satu rupiah).

Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 72.031.014.484,00 (tujuh puluh dua miliar tiga puluh satu juta empat belas ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) atau 98,05% dari total pagu anggaran dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.431.958.017,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh belas rupiah) atau 1,95 %.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran tahun 2021 yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Realisasi Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah
Tahun Anggaran 2021

NO.	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		FISIK %
				(Rp.)	%	
	SEKRETARIAT DAERAH		73.462.972.501	72.031.014.484	98,05	99,86
S3.	MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS KINERJA		39.932.207.689	39.232.355.155	98	100
		<i>Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah</i>	<i>23.180.985.830</i>	<i>23.178.944.342</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Hasil Penilaian IKM Perangkat Daerah</i>	<i>16.256.775.282</i>	<i>15.587.112.149</i>	<i>96</i>	<i>100</i>
		<i>Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	<i>200.731.370</i>	<i>192.057.153</i>	<i>96</i>	<i>100</i>
		<i>Rata-rata Nilai IKM Perangkat Daerah</i>	<i>293.715.207</i>	<i>274.241.511</i>	<i>93</i>	<i>100</i>

NO.	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		FISIK
				(Rp.)	%	%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		39.932.207.689	39.232.355.155	98	100
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	23.180.985.830	23.178.944.342	100	100
		Capaian IKM Perangkat Daerah	16.256.775.282	15.587.112.149	96	100
		Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP sesuai target Daerah	200.731.370	192.057.153	96	100
		Persentase IKM Perangkat Daerah Dengan Predikat Baik	293.715.207	274.241.511	93	100
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	143.396.630	142.393.363	99	100
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja	58.396.630	58.366.730	100	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA	5.000.000	4.997.120	100	100
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	5.000.000	4.999.100	100	100
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA	5.000.000	4.995.410	100	100
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	5.000.000	4.998.250	100	100
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	10.000.000	9.589.900	96	100
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Triwulanan	55.000.000	54.446.853	99	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan	23.037.589.200	23.036.550.979	100	100
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	22.977.589.200	22.976.703.681	100	100
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan yang Diverifikasi	20.000.000	19.921.228	100	100
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	10.000.000	9.993.800	100	100
1.2.4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10.000.000	9.998.972	100	100
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	20.000.000	19.933.298	100	100

NO.	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		FISIK
				(Rp.)	%	%
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	29.935.000	27.914.150	93	100
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang diamankan	-	-	0	100
1.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang semesteran dan akhir tahun	10.000.000	8.701.000	87	100
1.3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen KIB dan KIR	19.935.000	19.213.150	96	100
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	196.223.103	195.045.510	99	100
1.4.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Mesin/Kartu Absensi	25.067.500	24.590.500	98	100
1.4.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	161.160.000	160.508.315	100	100
1.4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kepegawaian yang Diselenggarakan	9.995.603	9.946.695	100	100
1.4.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	-	-	0	100
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum	6.259.757.649	6.191.792.030	99	100
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	70.000.000	69.900.050	100	100
1.5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	225.385.814	186.253.100	83	100
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	787.668.035	787.084.700	100	100
1.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan	351.228.000	341.462.000	97	100
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	300.000.000	298.280.000	99	100
1.5.6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah alat tulis kantor dan bahan/material lainnya	158.760.000	157.899.500	99	100
1.5.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minum Rapat dan Jamuan Tamu	1.817.800.000	1.817.778.072	100	100
1.5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	2.343.922.500	2.342.051.458	100	100
1.5.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen yang Diarsipkan	153.000.300	141.803.150	93	100
1.5.10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengelolaan Website/Aplikasi/Sis tem Informasi	51.993.000	49.280.000	95	100

NO.	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		FISIK
				(Rp.)	%	%
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daedrah	322.418.300	319.423.830	99	100
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	-	-	0	100
1.6.2	Pengadaan Mebel	Jumlah meubelair kantor	302.418.300	299.585.330	99	100
1.6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	20.000.000	19.838.500	99	100
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.989.015.666	4.776.692.209	96	100
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Perangko, Materai, dan Buku Cek	4.000.000	3.694.000	92	100
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa telepon, air, listrik dan jasa layanan internet	478.923.480	438.486.399	92	100
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	400.915.926	393.641.600	98	100
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan	4.105.176.260	3.940.870.210	96	100
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Frekwensi Pemeliharaan Barang Milik Daerah	2.349.978.297	2.076.292.686	88	100
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah frekuensi pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	422.248.000	347.049.852	82	100
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah frekuensi pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional/lapangan	1.132.130.297	962.738.744	85	100
1.8.3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah frekuensi pemeliharaan meubelair	45.000.000	42.515.000	94	100
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara/rehab	355.000.000	354.071.190	100	100
1.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	235.600.000	228.138.900	97	100
1.8.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah frekuensi pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	160.000.000	141.779.000	89	100

NO.	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		FISIK
				(Rp.)	%	%
1.9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	542.795.267	542.159.467	100	100
1.9.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	105.430.267	105.430.267	100	100
1.9.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Dan Atribut	167.365.000	166.729.200	100	100
1.9.3	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	270.000.000	270.000.000	100	100
1.10	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	528.200.000	459.793.275	87	100
1.10.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah jasa sewa rumah jabatan Kepala Daerah	371.800.000	315.894.700	85	100
1.10.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah jasa sewa rumah jabatan Wakil Kepala Daerah	156.400.000	143.898.575	92	100
1.11	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	494.446.577	466.298.664	94	100
1.11.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Informasi Jabatan dan Syarat Jabatannya	176.807.000	174.402.430	99	100
1.11.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Hasil Suvey Indeks Kepuasan Masyarakat	71.388.207	62.984.681	88	100
1.11.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Laporan Perkembangan Reformasi Birokrasi	110.849.700	108.144.700	98	100
1.11.4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Perangkat daerah yang Dimonitoring dan Dievaluasi Pelayanan Publiknya	45.520.000	36.854.400	81	100
1.11.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dibina (SAKIP)	89.881.670	83.912.453	93	100
1.12	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Peserta Pembinaan/ Diseminasi/ Peningkatan Kapasitas.	1.038.452.000	997.998.992	96	100
1.12.1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah peserta diseminasi keprotokolan	541.538.000	501.507.000	93	100
1.12.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Video Profil Kota Tasikmalaya	374.222.000	373.829.192	100	100
1.12.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumentasi Kegiatan Pimpinan dan Sekretaris Daerah	122.692.000	122.662.800	100	100

NO.	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		FISIK
				(Rp.)	%	%
S1.	MENINGKATNYA KOORDINASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		29.928.549.592	29.588.069.006	99	100
		<i>Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik</i>	154.905.400	153.797.600	99	100
		<i>Persentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen LPPD Sesuai Ketentuan</i>	5.860.121.130	5.831.591.838	100	100
		<i>Persentase Implementasi Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>	22.761.187.568	22.566.265.385	99	100
		<i>Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron Dengan Peraturan Perundang Undangan</i>	1.152.335.494	1.036.414.183	90	100
2.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		29.928.549.592	29.588.069.006	99	99,33
		<i>Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik</i>	154.905.400	153.797.600	99	100
		<i>Persentase Implementasi Koordinasi dan Kebijakan Pemerintahan</i>	5.860.121.130	5.831.591.838	100	100
		<i>Persentase Fasilitasi Kegiatan Keagamaan</i>	18.908.108.668	18.764.787.862	99	100
		<i>Persentase Implementasi Koordinasi dan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	3.853.078.900	3.801.477.523	99	100
		<i>Persentase Produk Hukum Daerah yang Diundangkan</i>	1.152.335.494	1.036.414.183	90	96,67
2.1	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang dibina	5.787.330.180	5.773.226.400	100	100
2.1.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Kelurahan yang dievaluasi perkembangannya	49.238.900	48.520.950	99	100
2.1.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Penegasan Batas Wilayah	105.666.500	105.276.650	100	100
2.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya	5.632.424.780	5.619.428.800	100	100
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	22.761.187.568	22.566.265.385	99	100
2.2.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Monitoring dan Evaluasi terhadap Lembaga/Kelompok Masyarakat yang Menyelenggarakan Kegiatan Maghrib Mengaji (1069 DKM)	18.908.108.668	18.764.787.862	99	100
2.2.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Sosial	231.277.600	221.250.025	96	100

NO.	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		FISIK
				(Rp.)	%	%
2.2.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)	3.621.801.300	3.580.227.498	99	100
2.3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah	1.152.335.494	1.036.414.183	90	98,75
2.3.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya	237.391.350	226.037.763	95	96,67
2.3.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Perkara Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang ditangani	341.920.444	239.739.430	70	100
2.3.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pusat dan Produk Hukum Daerah	573.023.700	570.636.990	100	100
2.4	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah koordinasi antar Pemerintah Daerah	227.696.350	212.163.038	93	100
2.4.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kegiatan rangkaian APEKSI	227.696.350	212.163.038	93	100
2.4.2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah naskah kerjasama luar negeri yang dilaksanakan	-	-	0	100
2.4.3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerjasama yang di Evaluasi	-	-	0	100
S2.	MENINGKATNYA KOORDINASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		3.602.215.220	3.210.590.323	89	100
		<i>Persentase Implementasi dan Koordinasi Kebijakan Pembinaan Dunia Usaha, Sumber Daya Alam dan Pertanian</i>	1.256.565.150	969.583.505	77	100
		<i>Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sesuai Peraturan</i>	1.145.351.060	1.091.632.887	95	100
		<i>Persentase Perangkat Daerah yang Mengusulkan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Melalui ULP</i>	1.200.299.010	1.149.373.931	96	100
3.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		3.602.215.220	3.210.590.323	89	100
		Persentase Implementasi Koordinasi dan Kebijakan Perekonomian	1.256.565.150	969.583.505	77	100
		Persentase Implementasi Koordinasi dan Kebijakan Pembangunan	279.429.200	257.066.210	92	100
		Persentase Optimalisasi Percepatan Pembangunan Daerah	865.921.860	834.566.677	96	100
		Persentase Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.299.010	1.149.373.931	96	100

NO.	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		FISIK
				(Rp.)	%	%
3.1	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah BUMD yang di Evaluasi.	1.256.565.150	969.583.505	77	100
3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD yang di Evaluasi	110.557.000	101.754.285	92	100
3.1.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah pangkalan LPG 3 Kg yang Dimonitoring dan Dievaluasi	1.031.985.650	756.877.935	73	100
3.1.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL	114.022.500	110.951.285	97	100
3.2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	1.145.351.060	1.091.632.887	95	100
3.2.1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Pelaksanaan Asisten RKA/DPA	279.429.200	257.066.210	92	100
3.2.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Monitoring Kegiatan Pembangunan	185.647.960	183.970.655	99	100
3.2.3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	680.273.900	650.596.022	96	100
3.3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.	Jumlah Realisasi Pengadaan Barang dan jasa terhadap jumlah Usulan	1.200.299.010	1.149.373.931	96	100
3.3.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	234.311.117	232.524.354	99	100
3.3.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Paket Pengadaan Barang Jasa yang dilakukan melalui SPSE	774.334.693	730.763.666	94	100
3.3.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dan diadvokasi	191.653.200	186.085.911	97	100
JUMLAH			73.462.972.501	72.031.014.484	98,05	99,86

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, tugas Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya adalah membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Analisis terhadap pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021, mengacu pada indikator-indikator sasaran pada Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-

2022 yang kemudian dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan
Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya

No.	Indikator Kinerja	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Prioritas Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	
Periode Renstra 2017-2022													
1.	Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik	%	-	-	100	100	-	-	100	100	-	-	
2.	Persentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen LPPD Sesuai Ketentuan	%	-	-	100	100	-	-	100	100	-	-	
3.	Persentase Implementasi Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	-	-	100	100	-	-	100	100	-	-	
4.	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron Dengan Peraturan Perundang Undangan	%	-	-	100	100	-	-	100	100	-	-	
5.	Persentase Implementasi dan Koordinasi Kebijakan Pembinaan Dunia Usaha, Sumber Daya Alam dan Pertanian	%	-	-	100	100	-	-	100	100	-	-	
6.	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sesuai Peraturan	%	-	-	100	100	-	-	100	100	-	-	
7.	Persentase Perangkat Daerah yang Mengusulkan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Melalui ULP	%	-	-	100	100	-	-	94,44	97,22	-	-	
8.	Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	-	-	73	73	-	-	91,67	94,44	-	-	
9.	Rata-rata Nilai IKM Perangkat Daerah	Kategori	-	-	Baik (76-88)	Baik (76-88)	-	-	Baik (83,32)	Baik (86,92)	-	-	
10.	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	-	-	A (80-90)	A (80-90)	-	-	A (81,81)	A (82,31)	-	-	
11.	Hasil Penilaian IKM Perangkat Daerah	Kategori	-	-	77-88 (Baik)	77-88 (Baik)	-	-	79,06 (Baik)	79,58 (Baik)	-	-	
Periode Renstra 2023-2026													
1.	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Hasil Evaluasi SAKIP Kota	Nilai	-	-	-	-	11	11,25	-	-	11	11,25	
2.	Persentase Nilai IKM Perangkat Daerah Berkategori Sangat Baik	%	-	-	-	-	40	45	-	-	40	45	
3.	Indeks Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD yang Meningkatkan	Kategori	-	-	-	-	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	-	-	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
4.	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron Dengan Peraturan Perundang-undangan	%	-	-	-	-	100	100	-	-	100	100	
5.	Indek Tata Kelola Barang dan Jasa	Point	-	-	-	-	40	50	-	-	40	50	

Analisis terhadap Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya sampai dengan tahun 2021 dapat diuraikan berdasarkan capaian indikator sasaran sebagai berikut:

1. *Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik*

Capaian kinerja indikator sasaran Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik sebesar 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini diperoleh dari proses hasil kegiatan penilaian dari evaluasi perkembangan, lomba kelurahan dan penilaian sinergitas kinerja kecamatan, dengan hasil 69 kelurahan berkinerja baik, dan 10 kecamatan yang berkinerja baik, kemudian diterapkan dalam perhitungan indikator sasaran Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik dengan perhitungan $69 \text{ jumlah kelurahan yang berkinerja baik} \div 69 \text{ jumlah kelurahan yang ada} \times 100\%$ dengan hasil realisasi sebesar 100%. Nilai capaian Indikator sasaran Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik sebesar 100% didukung dengan adanya pembinaan kepada kelurahan dan kecamatan yang intensif setiap tahunnya melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Evaluasi Perkembangan dan Lomba Kelurahan sebagai pelaksanaan amanat Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Pada tahun 2022 Kelurahan Cilembang ikutserta dalam Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Barat dan meraih peringkat ke-4.
- b. Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan sebagai pelaksanaan amanat Pergub Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja

Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat.

- c. Intensifikasi entry Instrumen Evaluasi Perkembangan Kelurahan melalui aplikasi EPDesKel yang terkoneksi ke Kementerian Dalam Negeri (seluruh kelurahan telah melakukan entry).
- d. Intensifikasi entry Profil Kelurahan melalui aplikasi Prodeskel yang terkoneksi ke Kementerian Dalam Negeri (seluruh kelurahan telah melakukan entry).

2. *Persentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen LPPD Sesuai Ketentuan*

Capaian kinerja indikator sasaran ini sebesar 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Nilai pencapaian tersebut diperoleh dari hasil penilaian perangkat daerah yang menyampaikan dokumen LPPD sesuai dengan ketentuan, dimana 36 perangkat daerah menyampaikan dokumen LPPD sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Kemudian jumlah tersebut diterapkan dalam perhitungan indikator sasaran Persentase Perangkat Daerah dengan Dokumen LPPD Sesuai Ketentuan dengan perhitungan 36 jumlah Perangkat daerah yang menyampaikan dokumen LPPD sesuai dengan ketentuan dibagi target 36 jumlah perangkat daerah yang ada yang hasilnya dikali 100% dengan hasil realisasi sebesar 100%.

Keberhasilan capaian kinerja indikator sasaran Indikator sasaran Persentase Perangkat Daerah dengan Dokumen LPPD Sesuai Ketentuan didukung dengan adanya hasil pengumpulan data pendukung Perangkat Daerah yang sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sehingga pengisian data dan eviden pada Sistem Informasi LPPD capaiannya 100%.

3. *Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang Undangan*

Capaian kinerja indikator sasaran Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan sebesar 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Keberhasilan capaian indikator sasaran ini diperoleh dari ralisasi jumlah produk hukum daerah yang harmonis/ sinkron dengan peraturan perundang undangan, dengan perhitungan 50 jumlah produk hukum daerah yang harmonis/ sinkron dibagi dengan 50 peraturan perundang

undangan, kemudian hasilnya dikali 100% maka realisasinya sebesar 100%.

Keberhasilan capaian kinerja indikator sasaran Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan didukung dengan dihasilkannya produk hukum yang berkesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, keperluan/kepentingan umum dan kesusilaan, serta adanya sumber daya aparatur yang berkompetensi, dan adanya fasilitasi dalam penyusunan produk hukum yang memadai.

4. *Persentase Implementasi Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat*

Capaian kinerja indikator sasaran Persentase Implementasi Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat sebesar 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini diperoleh dari kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang di implementasikan dan fasilitasi koordinasi selama tahun 2021 dengan perhitungan dari ralisasi 10 kebijakan yang di implementasikan dibagi dengan 10 kebijakan yang ditargetkan, hasilnya dikali 100% maka realisasinya 100%.

Keberhasilan capaian kinerja Indikator sasaran Persentase Implementasi Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat, didukung dengan adanya upaya peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah lingkup koordinasi Bagian Kesra yang didukung dengan sinergi program dan kegiatan di tiap tiap Perangkat Daerah.

5. *Persentase Implementasi dan Koordinasi Kebijakan Pembinaan Dunia Usaha, Sumber Daya Alam dan Pertanian*

Capaian indikator sasaran Presentase *Implementasi dan Koordinasi Kebijakan Pembinaan Dunia Usaha, Sumberdaya Alam dan Pertanian* sebesar 100%, dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

6. *Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sesuai Peraturan*

Capaian kinerja indikator sasaran *Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sesuai*

Peraturan sebesar 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian target indikator kinerja ini diperoleh dari hasil evaluasi dan pelaporan pembangunan perangkat daerah, dengan perhitungan realisasi 36 jumlah perangkat daerah yang menyampaikan laporan realisasi pembangunan tepat waktu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dibagi 36 perangkat daerah dan hasilnya dikali 100% maka realisasinya sebesar 100%.

Keberhasilan capaian kinerja indikator sasaran *Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sesuai Peraturan* karena semua perangkat daerah telah menyampaika laporan pelaksanaan kegiatan setiap bulannya sesuai waktu yang ditentukan.

7. *Persentase Perangkat Daerah yang Mengusulkan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Melalui ULP*

Tingkat capaian indikator sasaran *Persentase Perangkat Daerah yang Mengusulkan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Melalui ULP* sebesar 94,44% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian indikator sasaran ini diperoleh dari hasil penyampaian kelengkapan data pengadaan barang/ jasa dari setiap perangkat daerah melalui Sistem Informasi Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa pada tahun 2021, dengan perhitungan realisasi 34 perangkat daerah yang mengusulkan pemilihan penyedia barang dan jasa seluruhnya melalui ULP dibagi target 36 perangkat daerah hasilnya dikali 100% maka realisasinya sebesar 94,44%.

Ketidaktercapaian target sasaran ini dikarenakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 masih terdapat dua perangkat daerah yang tidak mengusulkan pemilihan penyedia barang/jasa melalui ULP dikarenakan perangkat daerah dimaksud tidak memiliki paket pengadaan barang jasa yang harus di lelangkan.

8. *Rata-rata Nilai IKM Perangkat Daerah*

Berdasarkan pengukuran rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemeritnah Kota Tasikmalaya, capaian *Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah* sesuai dengan target

yang ditetapkan (100%) yaitu kategori 'baik' dengan nilai realisasi sebesar 83,32.

Realisasi kinerja indikator sasaran *Rata-rata Nilai IKM Perangkat Daerah* adalah penjumlahan hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah (3.083) dibagi jumlah perangkat daerah yang melakukan survey (36 perangkat daerah ditambah UPTD khusus RSUD dr. Soekardjo).

Keberhasilan capaian kinerja Indikator sasaran *Rata-rata Nilai IKM Perangkat Daerah*, didukung dengan adanya koordinasi, dukungan dan komitmen bersama dari semua perangkat daerah, serta adanya pembinaan dan pengawasan yang konsisten dalam pelaksanaan pelayanan publik.

9. *Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah*

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata nilai SAKIP perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebesar 76,10. Nilai realisasi tersebut lebih tinggi 3,10 point dari target yang ditentukan sehingga capaian kinerja indikator *Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah* sebesar 104,25% dari target yang ditetapkan.

Capaian kinerja indikator sasaran ini diperoleh dari perhitungan jumlah nilai hasil evaluasi SAKIP internal (2.739,52) dibagi jumlah perangkat daerah (36 perangkat daerah).

Keberhasilan capaian kinerja Indikator sasaran *Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah* ini tidak lepas dari adanya koordinasi, dukungan dan komitmen bersama dari semua perangkat daerah, serta adanya pembinaan dan pengawasan yang konsisten.

10. *Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah*

Hasil Penilaian SAKIP Sekretariat Daerah oleh Tim Penilai SAKIP Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya dari Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya mendapatkan kategori A (dengan nilai 81,81) capaian tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2021, yaitu kategori A (dengan interval nilai 80-90).

Keberhasilan capaian kinerja indikator sasaran *Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah* ini tercapai karena adanya koordinasi,

dukungan dan komitmen bersama dari seluruh *stakeholder* dan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.

11. Hasil Penilaian IKM Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya, IKM Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya masuk ke dalam kategori 'baik' (dengan nilai 79,06). Capaian tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2021, yaitu kategori Baik (dengan interval nilai 77-88).

Keberhasilan capaian kinerja indikator sasaran *Hasil Penilaian IKM Perangkat Daerah*, didukung karena adanya koordinasi, dukungan dan komitmen bersama dari seluruh *stakeholder* dan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa Kedudukan Sekretariat Daerah merupakan staf Pemerintah Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah.

2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta Staf Ahli Wali Kota.
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara.
5. Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.
6. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dalam hal membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dapat diidentifikasi ke dalam 2 (dua) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu permasalahan pada kebijakan, program dan kebutuhan teknis operasional pada kegiatan.

Pada tataran kebijakan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya manajemen sumber daya aparatur dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan menciptakan budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya reformasi birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Kualitas penerapan sistem dan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, dan pelayanan publik yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan terintegrasi masih perlu ditingkatkan.

Pada tingkat implementasi program pada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:

1. Kurangnya koordinasi dalam upaya mengoptimalkan kinerja Perangkat Daerah yang berpengaruh terhadap optimalisasi capaian Indikator Kinerja Kunci.
2. Belum optimalnya peningkatan SPM di Kota Tasikmalaya.

3. Belum optimalnya penataan/ inventarisasi dengan baik Dokumen Kegiatan Kecamatan.
4. Permasalahan penilaian Kelurahan masih adanya Kelurahan dengan kategori berkembang/kurang berkembang.
5. Kurangnya koordinasi dan pengawasan terhadap perubahan tata guna tanah yang berakibat adanya tanda batas alam wilayah yang hilang, dan adanya pilar batas wilayah yang rusak dan hilang.
6. Keterbatasan sumber daya aparatur dalam melakukan pendataan dan identifikasi unsur nama rupabumi.
7. Minimnya inisiator dan fasilitator dan hambatan birokrasi dalam kerjasama daerah.
8. Belum optimalnya peningkatan standarisasi sarana, prasarana, dan kuantitas sumber daya aparatur, yang akan berpengaruh terhadap pelayanan pada Bagian Kesra.
9. Masih rendahnya koordinasi antar Perangkat Daerah, lembaga non pemerintah, dan pemangku kebijakan lainnya dalam penanganan permasalahan bidang Kesejahteraan Rakyat (Bina Mental Spiritual, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, ketenagakerjaan, Pendidikan, Pemuda Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, Linmas).
10. Masih kurang optimalnya kebijakan terkait penanganan permasalahan kesehatan, permasalahan sosial, pemberdayaan masyarakat dan ketenagakerjaan.
11. Belum optimalnya substansi dalam rancangan Produk Hukum yang disusun oleh pemrakarsa.
12. Belum optimalnya sistem peringatan dini dalam penanganan permasalahan hokum.
13. Belum optimalnya pembinaan dan pelayanan informasi hukum yang berkaitan dengan Produk Hukum.
14. Belum optimalnya koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengembangan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam.
15. Belum optimalnya kualitas administrasi pembangunan daerah dalam hal Penyediaan Data Pembangunan yang Terintegrasi.
16. Perangkat Daerah belum optimal dalam Penginputan Perencanaan Barang/Jasa pada Aplikasi SIMPATTIK dan Pengumuman Paket Pengadaan pada Aplikasi SiRUP LKPP.

17. Masih lambatnya penyampaian Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa dari Perangkat Daerah.
18. Untuk 10 Paket Strategis dilaksanakan Reviu HPS oleh Inspektorat atau BPKP.
19. Belum optimalnya peningkatan standarisasi sarana, prasarana, dan kuantitas sumber daya aparatur Jabatan Fungsional PBJ, yang akan berpengaruh terhadap nilai tingkatan level Indek Kematangan UKPBJ.
20. Belum optimalnya penataan kesesuaian/ penempatan sumber daya aparatur yang sesuai dengan kompetensi/ nomenklatur jabatan pada bidangnya serta tugas dan fungsinya.
21. Belum meratanya penempatan sumber daya aparatur yang berkompeten pada setiap bagian sesuai dengan jumlah beban kerja.
22. Proaktif keterlibatan bagian belum optimal dalam pengumpulan data perencanaan, hasil evaluasi dan pelaporan program kegiatan dari tiap bagian.
23. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur.
24. Masih rendahnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap pelayanan publik dengan hasil nilai masih berada di zona kuning.
25. Belum optimalnya Reviu SOP yang disesuaikan dengan regulasi yang baru.
26. Belum optimalnya peningkatan kualitas survey IKM.
27. Belum maksimalnya implementasi SAKIP, masih sebatas pemenuhan dokumen-dokumen.
28. Belum maksimalnya implementasi Reformasi Birokrasi, masih sebatas pemenuhan dokumen-dokumen.
29. Belum optimalnya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur keprotokolan.

Mengingat permasalahan seperti diuraikan di atas, maka untuk menentukan permasalahan yang akan dijadikan bahan isu strategis perlu diidentifikasi terlebih dulu isu global, nasional, regional, dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini. Adapun isu strategis yang diidentifikasi, adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai upaya peningkatan nilai LPPD dalam optimalisasi indikator kinerja kunci.
2. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah, dalam dan luar negeri.
3. Mengoptimalkan kebijakan-kebijakan terkait penanganan permasalahan bidang Kesejahteraan Rakyat (Bina Mental Spiritual, Sosial, dan Kemasyarakatan), dengan mengupayakan peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah, lembaga non pemerintah, dan pemangku kebijakan lainnya.
4. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi sumber daya aparatur di bidang perancangan peraturan perundang-undangan dalam rangka penataan produk hukum daerah disertai dengan peningkatan kualitas tertib administrasi, penyusunan, dan evaluasi produk hukum daerah, sebagai upaya mewujudkan Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah, serta meningkatkan pemahaman, kesadaran dan budaya taat hukum, fasilitasi pelaksanaan RANHAM dan penanganan pemberian bantuan hukum.
5. Mengoptimalkan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengembangan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam.
6. Mengoptimalkan kualitas Administrasi Pembangunan Daerah.
7. Mengoptimalkan kualitas Proses Pengadaan Barang/ Jasa.
8. Mengoptimalkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Perencanaan, Penata Usahaan Keuangan, Kepegawaian dan Pelayanan Internal Sekretariat Daerah.
9. Meningkatkan implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.
10. Mengoptimalkan Kualitas Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan, dan Evaluasi Kebijakan Bidang Protokol, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Bahwa pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi, dengan upaya perumusan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, bersinergi, holistik dan terintegrasi serta adanya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan di tingkat daerah, sehingga diharapkan melahirkan rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pembangunan daerah yang benar-benar dapat menjabarkan dan mengakomodir kebutuhan dan keinginan seluruh pemangku kepentingan/*stakeholders*.

3.1.1. Kebijakan Pembangunan Nasional

Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Dengan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Nasional, yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dengan tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dijabarkan dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 merupakan RKP tahun ke-4 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dijabarkan dalam 8 (delapan) Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan, yaitu:

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
2. Peningkatan Kualitas SDM Melalui Kesehatan dan Pendidikan.
3. Penanggulangan Pengangguran Disertai Peningkatan *Decent Job*.
4. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha.
5. Revitalisasi Industri DAN Penguatan Riset Terapan.
6. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energy.
7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Air Bersih dan Sanitasi.
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 menetapkan sejumlah sasaran pembangunan, yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3–5,9 persen.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3–6,0 persen.
3. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,5–8,5 persen.
4. Rasio Gini sebesar 0,375–0,378.
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,31–73,49.
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,02 persen.
7. Nilai Tukar Petani sebesar 103–105.
8. Nilai Tukar Nelayan sebesar 106–107.

3.1.2. Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 merupakan perencanaan tahun terakhir untuk RPJMD Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023. Tema RKPD yang diusung dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 adalah **"Mencapai Kemandirian masyarakat Jawa Barat"**, tema ini mendukung dan telah selaras dengan Tema RKP Tahun 2023, dan tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 diarahkan untuk mencapai kemandirian setelah menghadapi pandemi COVID-19.

Adapun RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 memuat dan memperhatikan berbagai isu strategis diantaranya:

1. Kualitas Nilai Kehidupan dan Daya Saing Sumber daya Manusia.
2. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan.
3. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.
4. Kemiskinan, Pengangguran, dan Masalah Sosial.
5. Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 tersebut di atas, diimplementasikan dalam prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023 yaitu:

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah.
2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi.
3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan.
4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.
5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan.
6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana.
7. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
8. Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa).
9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara.
10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
11. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi dan Misi Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022, Sekretariat Daerah mendukung untuk mewujudkan Visi “KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI”. Visi tersebut mengandung makna :

Religius : suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Alloh, Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya dengan keikhlasan hati dan

dengan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai dan norma serta kearifan lokal.

Maju : suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang kreatif, produktif, inovatif, dan berdaya saing, disiplin, berpendidikan tinggi, sehat lahir dan batin, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat dengan toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan serta ditunjang oleh infrastruktur dasar perkotaan yang memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan.

Madani : suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang sejahtera, maju, beradab dalam membangun, menjalani, dan mamaknai kehidupannya, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai.

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal.
2. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat.
3. Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
4. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Sekretariat Daerah bertanggungjawab untuk mendukung Misi ke 1 yaitu mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal. Misi ini dimaksudkan bahwa masyarakat Kota Tasikmalaya adalah masyarakat religius yang senantiasa menjunjung tinggi harkat,

martabat dan kemuliaan serta berpegang teguh pada tata nilai, norma, moral dan agama serta memiliki akhlak dan karakter yang baik dan mulia, menjaga dan memelihara kearifan lokal dan kebudayaan daerah yang baik dan luhur.

Misi ke 2 yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Misi ini dimaksudkan untuk terus mendorong upaya penanggulangan kemiskinan dengan memberikan fasilitasi, pendampingan dan penguatan yang terus menerus kepada masyarakat miskin, meningkatkan jaminan dan perlindungan social serta pemberdayaan penyandang masalah Kesejahteraan social. Memperkuat kondisi perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, mengendalikan inflasi dan mengurangi kesenjangan, pengurangan pengangguran, memperkuat daya saing pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka penguatan system ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan dan potensi lokal, peningkatan sarana dan prasarana perekonomian, membuka investasi dan lapangan kerja serta kesempatan berusaha, peningkatan akses untuk permodalan dan pemasaran, sehingga kondisi perekonomian dan daya beli serta daya saing masyarakat meningkat, tumbuh dan merata.

Misi ke 5 yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Misi ini dimaksudkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik yang didukung oleh sarana bangunan kantor dan prasarana pemerintahan yang representatif, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi.

Selanjutnya Sekretariat Daerah, dalam mewujudkan pencapaian Misi ke 1,2 dan ke 5 tersebut mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya adalah :

Tujuan ke satu dan kedua dari misi ke satu yaitu Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius, dengan

sasaran Meningkatnya toleransi, kerukunan dan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah, dengan sasaran Meningkatnya apresiasi terhadap kesenian dan kebudayaan daerah.

Tujuan ke tiga dan keempat dari misi ke dua yaitu Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat, dengan sasaran Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat, Menguatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, dengan sasaran :

1. Meningkatnya peranan koperasi, usaha mikro kecil, industri perdagangan dan jasa
2. Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha
3. Meningkatnya pertanian dan ketahanan pangan daerah

Tujuan ke delapan dari misi ke lima yaitu terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi, dengan sasaran : Sasaran ke lima belas meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi, dan strategi meningkatkan pelayanan publik yang profesional, inovatif dan memuaskan berbasis teknologi informasi yang dilaksanakan melalui program tasik layanan prima, serta arah kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur, penguatan kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua layanan publik, serta peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik.

Dengan mengacu pada tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD tersebut di atas, maka disusun tujuan dan sasaran rencana kerja tahun SETDA beserta indikator kinerjanya yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2022

No.	Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target
Visi : KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI							
Misi. 1 MEWUJUDKAN TATA NILAI KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS DAN BERKEARIFAN LOKAL							
1	Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan, dan Kesejahteraan Rakyat			1.1.	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Kategori	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)
		1.	Meningkatnya Koordinasi dan Implementasi Kebijakan Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat	1.3.	Persentase Implementasi Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	100
Misi . 2 MENGURANGI TINGKAT KEMISKINAN DAN MENINGKATKAN DAYA BELI							
1.	Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan, dan Kesejahteraan Rakyat			1.1.	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Kategori	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)
		1.	Meningkatnya Koordinasi dan Implementasi Kebijakan Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat	1.3.	Persentase Implementasi Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	100
2.	Terwujudnya Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan			2.1.	Persentase Koordinasi dan Implementasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	%	100
		2.	Meningkatnya Koordinasi dan Implementasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	2.1.	Persentase Implementasi dan Koordinasi Kebijakan Pembinaan Dunia Usaha, Sumber Daya Alam dan Pertanian	%	100

No.	Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target
Misi . 5 MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH							
1.	Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan, dan Kesejahteraan Rakyat			1.1.	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Kategori	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)
		1.	Meningkatnya Koordinasi dan Implementasi Kebijakan Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat	1.1.	Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik	%	100
				1.2.	Persentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen LPPD Sesuai Ketentuan	%	100
				1.3	Persentase Implementasi Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	100
				1.4.	Persentase Produk Daerah yang Harmonis dan Sinkron Dengan Peraturan Perundang Undangan	%	100
2.	Terwujudnya Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan			2.1.	Persentase Koordinasi dan Implementasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	%	100
				2.2.	Indeks Pengelolaan Barang dan Jasa	%	100
		2.	Meningkatnya Koordinasi dan Implementasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	2.2.	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sesuai Peraturan	%	100
				2.3.	Persentase Perangkat Daerah yang Mengusulkan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Melalui ULP	%	100

No.	Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target
3.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik			3.1.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kategori	73
		3.	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	3.1.	Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	75
				3.2.	Rata-rata Nilai IKM Perangkat Daerah	Kategori	Baik (76-88)
				3.3.	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	A (80-90)
				3.4.	Hasil Penilaian IKM Perangkat Daerah	Kategori	77-88 (Baik)

3.3. Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya merencanakan 3 program yang terdiri dari 20 kegiatan dan 74 sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renja Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2022. Namun dengan adanya penyesuaian terhadap kebutuhan dan anggaran, maka Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya merencanakan perubahan terhadap rencana kerja program/ kegiatan/ sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan tetap memperhatikan ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun rincian rencana program/ kegiatan/ sub kegiatan setelah dilakukan perubahan adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
 4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.
 5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD.
 6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 4. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
 5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.

- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah:
 1. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
 2. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
 3. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
 1. Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai.
 2. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 3. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 4. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material.
 7. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu.
 8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 9. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
 10. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
 1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
 2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel.
 4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 9) Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :
1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 10) Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah :
1. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah.
- 11) Kegiatan Penataan Organisasi :
1. Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan.
 2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana.
 3. Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

4. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana.
 5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
- 12) Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan :
1. Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.
 2. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan.
 3. Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan.

II. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat :

- 1) Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan :
 1. Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan.
 2. Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan.
 3. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 2) Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat:
 1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.
 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial.
 3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat.
- 3) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum:
 1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah.
 2. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum.
 3. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.
- 4) Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah:
 1. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri.

III. Program Perekonomian dan Pembangunan:

- 1) Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian :
 1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD.
 2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.
 3. Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
- 2) Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam:

1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan.
 2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
- 3) Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan:
1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan.
 2. Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan.
 3. Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.
- 4) Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa:
1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.
 2. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik.
 3. Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja program dan kegiatan serta pagu indikatif dan prakiraan maju Tahun 2023 pada Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.1. berikut :

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023**

(Sebelum Perubahan)

Kode Ring	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					APBD Kota	APBD Provinsi	APBN	Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			100%	83,990,987,000	-	-	83,990,987,000		100%	83,990,987,000
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.01.2..01.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				143,396,630	-	-	143,396,630			143,396,630
4.01.01.2..01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja yang Disusun Jumlah Dokumen Rencana Strategis yang disusun Jumlah Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah tingkat daerah, tingkat provinsi dan pusat	Kota Tasikmalaya	100%	58,396,630			58,396,630		100%	58,396,630
4.01.01.2..01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Kota Tasikmalaya	100%	5,000,000			5,000,000		100%	5,000,000
4.01.01.2..01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Kota Tasikmalaya	100%	5,000,000			5,000,000		100%	5,000,000
4.01.01.2..01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan DPA	Kota Tasikmalaya	100%	5,000,000			5,000,000		100%	5,000,000
4.01.01.2..01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	Jumlah Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA	Kota Tasikmalaya	100%	5,000,000			5,000,000		100%	5,000,000

4.01.01.2..01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Tasikmalaya	100%	10,000,000			10,000,000	100%	10,000,000
4.01.01.2..01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi dan pelaporan propel perangkat daerah	Kota Tasikmalaya		55,000,000			55,000,000		55,000,000
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	25,185,112,000	-	-	25,185,112,000	100%	25,185,112,000
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji	Kota Tasikmalaya	100%	25,125,112,000			25,125,112,000	100%	25,125,112,000
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD	Kota Tasikmalaya	100%	20,000,000			20,000,000	100%	20,000,000
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun sesuai SAP	Kota Tasikmalaya	100%	10,000,000			10,000,000	100%	10,000,000
4.01.01.2.03.01.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan	Kota Tasikmalaya	100%	10,000,000	-	-	10,000,000	100%	10,000,000
4.01.01.2.03.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan nan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran	Kota Tasikmalaya	100%	20,000,000	-	-	20,000,000	100%	20,000,000
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengguna Barang; Jumlah barang milik daerah yang diasuransikan; Jumlah laporan barang milik daerah pada Pengguna Barang			98,969,520			98,969,520		98,969,520
4.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang diamankan	Kota Tasikmalaya	100%	69,034,520			69,034,520	100%	69,034,520
4.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang semesteran dan akhir tahun	Kota Tasikmalaya	100%	10,000,000			10,000,000	100%	10,000,000

4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sarana peningkatan disiplin aparatur; Jumlah dokumen penilaian pegawai; Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan			246,223,203			246,223,203		246,223,203
4.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana Prasarana	Kota Tasikmalaya	100%	25,067,600			25,067,600	100%	25,067,600
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya, jumlah pakaian korpri, jumlah pakaian khusus hari tertentu	Kota Tasikmalaya	100%	161,160,000			161,160,000	100%	161,160,000
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah kegiatan Pembinaan kepegawaian yang diselenggarakan	Kota Tasikmalaya	100%	9,995,603			9,995,603	100%	9,995,603
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti	Kota Tasikmalaya	100%	50,000,000			50,000,000	100%	50,000,000
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu jasa pelayanan administrasi umum		100%	6,980,174,335			6,980,174,335	100%	6,980,174,335
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kota Tasikmalaya	100%	70,000,000			70,000,000	100%	70,000,000
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	Kota Tasikmalaya	100%	257,933,000			257,933,000	100%	257,933,000
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kota Tasikmalaya	100%	87,668,035			787,668,035	100%	787,668,035
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan; Jumlah penggandaan; Jumlah penjilidan	Kota Tasikmalaya	100%	351,228,000			351,228,000	100%	351,228,000
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan; Jumlah iklan media massa (E-Paper)	Kota Tasikmalaya	100%	300,000,000			300,000,000	100%	300,000,000

4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah alat tulis kantor dan bahan/material lainnya	Kota Tasikmalaya	100%	158,760,000		158,760,000	100%	158,760,000
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Tasikmalaya	100%	3,281,792,000		3,281,792,000	100%	3,281,792,000
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen yang diarsipkan	Kota Tasikma	100%	153,000,300		153,000,300	100%	153,000,300
4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	pengelolaan website/aplikasi/sistem Informasi	Kota Tasikma	100%	51,993,000		51,993,000	100%	51,993,000
4.01.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Jumlah barang milik daerah			1,047,200,000		547,200,000		547,200,000
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kota Tasikmalaya	100%	500,000,000		500,000,000	100%	500,000,000
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubelair kantor	Kota Tasikmalaya	100%	27,200,000		27,200,000	100%	27,200,000
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah peralatan gedung kantor	Kota Tasikmalaya	100%	20,000,000		20,000,000	100%	20,000,000
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5,864,357,730		5,864,357,730		5,864,357,730
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan buku cek	Kota Tasikmalaya	100%	4,000,000		4,000,000	100%	4,000,000
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet	Kota Tasikmalaya	100%	803,923,480		803,923,480	100%	803,923,480

4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Bedongkaran Kantor		Kota Tasikmalaya	100%	357,933,000		357,933,000	100%	357,933,000
4.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas yang dipenuhi kewajiban perpajakannya; Frekuensi pemeliharaan barang milik daerah		100%	2,349,978,297		2,349,978,297	100%	2,349,978,297
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah frekuensi pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	Kota Tasikmalaya	100%	422,248,000		422,248,000	100%	422,248,000
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah frekuensi pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional/lapangan	Kota Tasikmalaya	100%	1,132,130,297		1,132,130,297	100%	1,132,130,297
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah meubelair kantor yang dipelihara	Kota Tasikmalaya	100%	45,000,000		45,000,000	100%	45,000,000
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara/rehab	Kota Tasikmalaya	100%	355,000,000		355,000,000	100%	355,000,000
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kota Tasikmalaya	100%	235,600,000		235,600,000	100%	235,600,000
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kota Tasikmalaya	100%	160,000,000		160,000,000	100%	160,000,000
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Waktu Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH		100%	945,991,000		945,991,000	100%	945,991,000
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Kota Tasikmalaya	100%	178,626,000		178,626,000	100%	178,626,000

4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Kota Tasikmalaya	100%	600,000,000			600,000,000		100%	600,000,000
4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah waktu Fasilitasi Kerumaha Tanggaan Sekretariat daerah	Kota Kota Tasikmalaya Tasikmalaya		688,200,000			688,200,000			688,200,000
4 01 01 2.12. 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga KDH	Kota Tasikmalaya	100%	461,800,000			461,800,000		100%	461,800,000
4 01 01 2.12. 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga WKDH	Kota Tasikmalaya	100%	226,400,000			226,400,000		100%	226,400,000
4 01 01 2. 13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen penataan organisasi	Kota Tasikmalaya		660,000,000			660,000,000			660,000,000
4 01 01 2. 13. 01	Pengelolaan kelembagaan dan Analisa Jabatan	Jumlah Dokumen Informasi jabatan dan Syarat Jabatannya; Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan; Jumlah Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah.	Kota Tasikmalaya	100%	230,400,000			230,400,000		100%	230,400,000
4 01 01 2. 13. 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Hasil Suvey Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dan SOP Setda yang disusun, Jumlah perangkat Daerah yang dibina ketatalaksanaannya. Jumlah Dokumen Reviu Peta proses bisnis dan perangkat daerah yang dibina.	Kota Tasikmalaya	100%	107,740,230			107,740,230		100%	107,740,230

4 01 01 2. 13. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LKIP Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	100%	114,659,170			114,659,170		100%	114,659,170
4 01 01 2. 13. 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Perangkat daerah yang Dimonitoring dan Dievaluasi Pelayanan Publiknya	Kota Tasikmalaya	100%	62,500,000			62,500,000		100%	62,500,000
4. 01. 01. 2. 14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah waktu Fasilitas Keprotokolan dan Komunikasi KDH dan WKDH			1,147,417,750			1,147,417,750			1,147,417,750
4. 01. 01. 2. 14. 01	Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Fasilitas Keprotokolan	Kota Tasikmalaya	100%	556,874,000			556,874,000		100%	556,874,000
4. 01. 01. 2. 14. 02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Kota Tasikmalaya	100%	507,000,000			507,000,000		100%	507,000,000
4. 01. 01. 2. 14. 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumen	Kota Tasikmalaya	100%	83,543,750			83,543,750		100%	83,543,750
4. 01. 02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik	Kota Tasikmalaya	100%	35,135,787,232			35,135,787,232		100%	35,135,787,232
4. 01. 02. 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Meningkatnya Perkembangan Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Pemerintah Kota Tasikmalaya			5,589,020,700			5,589,020,700			5,589,020,700
4 01 02 2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Kecamatan yang dinilai Jumlah Kelurahan yang dievaluasi perkembangannya Jumlah Peserta Pembinaan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Tasikmalaya	100%	58,994,500			58,994,500		100%	58,994,500
4 01 02 2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Pembakuan Nama Rupabumi Jumlah Dokumen Penegasan Batas Wilayah	Kota Tasikmalaya	100%	114,026,500			114,026,500		100%	114,026,500

4 01 02 2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Jumlah Dokumen Penyusunan	Kota Tasikmalaya	100%	5,415,999,700	5,075.000.000		5,415,999,700		100%	5,415,999,700
		Daerah									
4. 01. 02. 2. 02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terwujudnya Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		100%	28,189,349,282			28,189,349,282		100%	28,189,349,282
4. 01. 02. 2. 02. 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Kota Tasikmalaya	100%	26,767,523,282	20,945.559,000		26,767,523,282		100%	26,767,523,282
4. 01. 02. 2. 02. 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		Kota Tasikmalaya	100%	1,133,091,000			1,133,091,000		100%	1,133,091,000
4. 01. 02. 2. 02. 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		Kota Tasikmalaya	100%	288,735,000			288,735,000		100%	288,735,000
4. 01. 02. 2. 03	Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Meningkatnya Wawasan dan Pemahaman Aparatur dan Masyarakat tentang Penyusunan Produk Hukum			1,035,468,450			1,035,468,450			1,035,468,450
4. 01. 02. 2. 03. 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Jumlah Dokumen Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Jumlah Produk hukum yang bersifat penetapan	Kota Tasikmalaya	100%	350,446,350			350,446,350		100%	350,446,350
4. 01. 02. 2. 03. 02	Fasilitasi Bantuan Hukum		Kota Tasikmalaya	100%	446,510,000			446,510,000		100%	446,510,000

4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah media informasi hukum Jumlah Peserta Pembinaan Pengelola Produk Hukum Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pusat dan	Kota Tasikmalaya	100%	238,512,100		238,512,100	100%	238,512,100
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terwujudnya Sinergitas Antar Pemerintah Daerah dan Lembaga Dalam Pelaksanaan Pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan Mou dan PKS		100%	321,948,800		321,948,800	100%	321,948,800
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kegiatan rangkaian APEKSI Jumlah Kegiatan rangkaian FORSESDASI Jumlah naskah kerjasama Dalam Negeri yang dilaksanakan	Kota Tasikmalaya	100%	321,948,800		321,948,800	100%	321,948,800
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah naskah kerjasama luar negeri yang dilaksanakan	Kota Tasikmalaya	100%	5,145,600		5,145,600	100%	5,145,600
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Kota Tasikmalaya	100%	33,203,350		33,203,350	100%	33,203,350
4.01.03.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase implementasi koordinasi dan kebijakan Perekonomian			3,523,179,303		3,523,179,303		3,523,179,303
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi, Pengawasan Perekonomian Daerah Kota Tasikmalaya			560,874,650		560,874,650		560,874,650
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Bumda Dan BLUD	Jumlah BUMD dan BLUD yang dievaluasi	Kota Tasikmalaya	100%	82,265,000		82,265,000	100%	82,265,000

4.01.03.2..01.02	Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen Pengendalian	Kota Tasikmalaya	100%	286,344,650			286,344,650		100%	286,344,650
4.01.03.2.01.03	Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan	Kota Tasikmalaya	100%	192,265,000			192,265,000		100%	192,265,000
4.01.03.2..02	Administrasi Pembangunan	Jumlah Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan			1,418,400,000			1,418,400,000			1,418,400,000
4.01.03.2..02.01	Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen ASB, Jumlah Dokumen Standar Biaya Belanja Daerah, Jumlah Pelaksanaan Asistensi RKA/DPA	Kota Tasikmalaya	100%	300,000,000			300,000,000		100%	300,000,000
4.01.03.2..02.02	Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Evaluasi Program Pembangunan, Jumlah Monitoring Kegiatan Pembangunan, Jumlah Pengelolaan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan	Kota Tasikmalaya	100%	310,000,000			310,000,000		100%	310,000,000
4.01.03.2..02.03	Pengelolaan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	Kota Tasikmalaya	100%	808,400,000			808,400,000		100%	808,400,000
4.01.03.2.03	Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			1,543,904,653			1,543,904,653			1,543,904,653
4.01.03.2..03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah Realisasi Pengadaan Barang dan jasa terhadap jumlah Usulan	Kota Tasikmalaya	100%	302,208,000			302,208,000		100%	302,208,000
4.01.03.2..03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Paket Pengadaan Barang Jasa yang dilakukan melalui SPSE	Kota Tasikmalaya	100%	999,696,653			999,696,653		100%	999,696,653
4.01.03.2..03.03	Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dan diadvokasi	Kota Tasikmalaya	100%	242,000,000			242,000,000		100%	242,000,000

Tabel. 4.2.
Rumusan Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan
Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023

Kode Ring	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					APBD Kota	APBD Provinsi	APBN	Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			100%	84,962,236,054	-	-	84,962,236,054		100%	84,962,236,054
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.01.2.01.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				69,359,930	-	-	69,359,930			69,359,930
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja yang Disusun Jumlah Dokumen Rencana Strategis yang disusun Jumlah Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah tingkat daerah, tingkat provinsi dan pusat	Kota Tasikmalaya	100%	52,635,430			52,635,430		100%	52,635,430
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Kota Tasikmalaya	100%	4,500,000			4,500,000		100%	4,500,000
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Kota Tasikmalaya	100%	4,000,000			4,000,000		100%	4,000,000
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan DPA	Kota Tasikmalaya	100%	4,224,500			4,224,500		100%	4,224,500
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	Jumlah Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA	Kota Tasikmalaya	100%	4,000,000			4,000,000		100%	4,000,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Tasikmalaya	100%	8,755,800			8,755,800		100%	8,755,800
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi dan pelaporan propel perangkat daerah	Kota Tasikmalaya		51,148,150			51,148,150			51,148,150
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	26,616,251,176		-	26,616,251,176		100%	26,616,251,176
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji	Kota Tasikmalaya	100%	26,556,251,176			26,556,251,176		100%	26,556,251,176
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD	Kota Tasikmalaya	100%	20,000,000			20,000,000		100%	20,000,000
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun sesuai SAP	Kota Tasikmalaya	100%	10,000,000			10,000,000		100%	10,000,000
4.01.01.2.03.01.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan	Kota Tasikmalaya	100%	10,000,000		-	10,000,000		100%	10,000,000
4.01.01.2.03.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran	Kota Tasikmalaya	100%	20,000,000		-	20,000,000		100%	20,000,000
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengguna Barang; Jumlah barang milik daerah yang diasuransikan; Jumlah laporan barang milik daerah pada Pengguna Barang			80,110,800			80,110,800			80,110,800
4.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang diamankan	Kota Tasikmalaya	100%	55,000,000			55,000,000		100%	55,000,000

4.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang semesteran dan akhir tahun	Kota Tasikmalaya	100%	10,000,000			10,000,000		100%	10,000,000
-----------------	---	--	------------------	------	------------	--	--	------------	--	------	------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sarana peningkatan disiplin aparatur; Jumlah dokumen penilaian pegawai; Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan			291,093,000			291,093,000			291,093,000
4.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana Prasarana	Kota Tasikmalaya	100%	25,463,500			25,463,500		100%	25,463,500
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya, jumlah pakaian korpri, jumlah pakaian khusus hari tertentu	Kota Tasikmalaya	100%	202,023,900			202,023,900		100%	202,023,900
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah kegiatan Pembinaan kepegawaian yang diselenggarakan	Kota Tasikmalaya	100%	9,995,600			9,995,600		100%	9,995,600
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti	Kota Tasikmalaya	100%	53,610,000			53,610,000		100%	53,610,000
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu jasa pelayanan administrasi umum		100%	7,744,054,460			7,744,054,460		100%	7,744,054,460
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kota Tasikmalaya	100%	70,000,000			70,000,000		100%	70,000,000
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	Kota Tasikmalaya	100%	201,538,425			201,538,425		100%	201,538,425
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kota Tasikmalaya	100%	1,768,844,035			1,768,844,035		100%	1,768,844,035

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak; Jumlah penggandaan; Jumlah	Kota Tasikmalaya	100%	323,912,000			323,912,000		100%	323,912,000
		massa (E-Paper)									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah alat tulis kantor dan bahan/material lainnya	Kota Tasikmalaya	100%	158,760,000			158,760,000		100%	158,760,000
4.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum rapat dan jamuan tamu; Jumlah makan dan minum harian	Kota Tasikmalaya	100%	1,971,000,000			1,971,000,000		100%	1,971,000,000
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Tasikmalaya	100%	2,950,000,000			2,950,000,000		100%	2,950,000,000
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen yang diarsipkan	Kota Tasikma	100%	153,000,300			153,000,300		100%	153,000,300
4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	pengelolaan website/aplikasi/sistem Informasi	Kota Tasikma	100%	51,993,000			51,993,000		100%	51,993,000
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah			695,861,575			695,861,575			695,861,575
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubelair kantor	Kota Tasikmalaya	100%	295,861,575			295,861,575		100%	295,861,575
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	Kota Tasikmalaya	100%	400,000,000			400,000,000		100%	400,000,000

4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4,841,800,478			4,841,800,478			4,841,800,478
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat	Jumlah materai dan buku cek	Kota Tasikmalaya	100%	4,000,000			4,000,000	100%		4,000,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Tasikmalaya	100%	300,967,848			300,967,848		100%	300,967,848
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan; Jumlah perlengkapan kebersihan; Jumlah Jasa Keamanan; Jumlah Pengemudi; Jumlah Tenaga Harian Lepas; Jumlah jasa peningkatan pelayanan pegawai	Kota Tasikmalaya	100%	4,002,907,150			4,002,907,150		100%	4,0
4.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas yang dipenuhi kewajiban perpajakannya; Frekuensi pemeliharaan barang milik daerah		100%	2,882,537,547			2,882,537,547		100%	2,882,537,547
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah frekuensi pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	Kota Tasikmalaya	100%	322,326,450			322,326,450		100%	322,326,450
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah frekuensi pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional/lapangan	Kota Tasikmalaya	100%	1,274,586,297			1,274,586,297		100%	1,274,586,297

4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah meubelair kantor yang dipelihara	Kota Tasikmalaya	100%	45,000,000			45,000,000		100%	45,000,000
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara/rehab	Kota Tasikmalaya	100%	1,005,024,800			1,005,024,800		100%	1,005,024,800

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Waktu Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH		100%	599,765,088			599,765,088		100%	599,765,088
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Kota Tasikmalaya	100%	92,765,088			92,765,088		100%	92,765,088
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Dan Atribut	Kota Tasikmalaya	100%	100,000,000			100,000,000		100%	100,000,000
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Kota Tasikmalaya	100%	407,000,000			407,000,000		100%	407,000,000
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah waktu Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat daerah	Kota Kota Tasikmalaya Tasikmalaya		618,000,000			618,000,000			618,000,000
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga KDH	Kota Tasikmalaya	100%	618,000,000			618,000,000		100%	618,000,000

4 01 01 2. 13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen penataan organisasi	Kota Tasikmalaya		1,381,540,516			1,381,540,516			1,381,540,516
4 01 01 2. 13. 01	Pengelolaan kelembagaan dan Analisa Jabatan	Jumlah Dokumen Informasi jabatan dan Syarat Jabatannya; Jumlah Dokumen Standar	Kota Tasikmalaya	100%	1,037,952,700			1,037,952,700		100%	1,037,952,700

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4 01 01 2. 13. 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Hasil Suvey Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dan SOP Setda yang disusun, Jumlah perangkat Daerah yang dibina ketatalaksanaannya. Jumlah Dokumen Reviu Peta proses bisnis dan perangkat daerah yang dibina.	Kota Tasikmalaya	100%	86,100,000			86,100,000		100%	86,100,000
4 01 01 2. 13. 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi dan jumlah dokumen Zona Integritas, Jumlah dokumen LKIP Kota, Jumlah Perangkat Daerah yang dibina (SAKIP)	Kota Tasikmalaya	100%	115,760,480			115,760,480		100%	115,760,480
4 01 01 2. 13. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LKIP Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	100%	91,727,336			91,727,336		100%	91,727,336

4 01 01 2. 13. 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Perangkat daerah yang Dimonitoring dan Dievaluasi Pelayanan Publiknya	Kota Tasikmalaya	100%	50,000,000			50,000,000		100%	50,000,000
4. 01. 01. 2. 14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah waktu Fasilitas Keprotokolan dan Komunikasi KDH dan WKDH			485,550,600			485,550,600			485,550,600
4. 01. 01. 2. 14. 01	Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Fasilitas Keprotokolan	Kota Tasikmalaya	100%	485,550,600			485,550,600		100%	485,550,600

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4. 01. 02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik	Kota Tasikmalaya	100%	4,022,170,584			4,022,170,584		100%	4,022,170,584
4. 01. 02. 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Meningkatnya Perkembangan Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Pemerintah Kota Tasikmalaya			4,022,170,584			4,022,170,584			4,022,170,584
4 01 02 2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Kecamatan yang dinilai Jumlah Kelurahan yang dievaluasi perkembangannya Jumlah Peserta Pembinaan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Tasikmalaya	100%	4,022,170,584			4,022,170,584		100%	4,022,170,584
4 01 02 2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Pembakuan Nama Rupabumi Jumlah Dokumen Penegasan Batas Wilayah	Kota Tasikmalaya	100%	259,950,240			259,950,240		100%	259,950,240

4 01 02 2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Jumlah Dokumen Penyusunan LKPJ Kota Tasikmalaya Jumlah Dokumen Proposal yang di Verifikasi Jumlah Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah	Kota Tasikmalaya	100%	405,329,240			405,329,240		100%	405,329,240
4. 01. 02. 2. 02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terwujudnya Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		100%	27,885,109,412			27,885,109,412		100%	27,885,109,412
4 01 02 2 02 01	Fasilitasi Pengelolaan Rina		Kota	100%	25 125 148 612	20 945 559 000		25 125 148 612		100%	25 125 148 612

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4. 01. 02. 2. 02. 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		Kota Tasikmalaya	100%	5,357,945,600			5,357,945,600		100%	5,357,945,600
4. 01. 02. 2. 03	Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Meningkatnya Wawasan dan Pemahaman Aparatur dan Masyarakat tentang Penyusunan Produk Hukum			1,474,903,968			1,474,903,968			1,474,903,968
4. 01. 02. 2. 03. 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Jumlah Dokumen Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Jumlah Produk hukum yang bersifat penetapan	Kota Tasikmalaya	100%	280,357,650			280,357,650		100%	280,357,650
4. 01. 02. 2. 03. 02	Fasilitasi Bantuan Hukum		Kota Tasikmalaya	100%	557,208,000			557,208,000		100%	557,208,000

4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah media informasi hukum Jumlah Peserta Pembinaan Pengelola Produk Hukum Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pusat dan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum yang disosialisasikan, dan dipublikasikan, serta didokumentasikan	Kota Tasikmalaya	100%	273,779,118			273,779,118		100%	273,779,118
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terwujudnya Sinergitas Antar Pemerintah Daerah dan Lembaga Dalam Pelaksanaan Pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan Mou dan PKS		100%	363,559,200			363,559,200		100%	363,559,200
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kegiatan rangkaian APFKSI	Kota Tasikmalaya	100%	363,559,200			363,559,200		100%	363,559,200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.03.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase implementasi koordinasi dan kebijakan Perekonomian			666,183,690			666,183,690			666,183,690
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi, Pengawasan Perekonomian Daerah Kota Tasikmalaya			531,506,000			531,506,000			531,506,000
4.01.03.2.01.03	Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan	Kota Tasikmalaya	100%	531,506,000			531,506,000		100%	531,506,000
4.01.03.2..02	Administrasi Pembangunan	Jumlah Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan			295,420,000			295,420,000			295,420,000

4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen ASB, Jumlah Dokumen Standar Biaya Belanja Daerah, Jumlah PEIaksanaan Asistensi RKA/DPA	Kota Tasikmalaya	100%	295,420,000			295,420,000		100%	295,420,000
4.01.03.2.02.02	Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Evaluasi Program Pembangunan, Jumlah Monitoring Kegiatan Pembangunan, Jumlah Pengelolaan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Tasikmalaya	100%	210,780,000			210,780,000		100%	210,780,000
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	Kota Tasikmalaya	100%	693,160,000			693,160,000		100%	693,160,000
4.01.03.2.03	Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa			1,235,450,600			1,235,450,600			1,235,450,600
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah Realisasi Pengadaan Barang dan jasa terhadap jumlah Usulan	Kota Tasikmalaya	100%	241,828,600			241,828,600		100%	241,828,600
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Paket Pengadaan Barang Jasa yang dilakukan melalui SPSE	Kota Tasikmalaya	100%	799,883,000			799,883,000		100%	799,883,000
4.01.03.2.03.03	Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dan diadvokasi	Kota Tasikmalaya	100%	193,739,000			193,739,000		100%	193,739,000
Bagian Pemerintahan					5,051,009,264			5,051,009,264			
Bagian Hukum					1,111,344,768			1,111,344,768			
Bagian Kesejahteraan Rakyat					27,885,109,412	250,000,000		28,135,109,412			
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam					666,183,690			666,183,690			
Bagian Administrasi Pembangunan					1,199,360,000			1,199,360,000			

Bagian Pengadaan Barang/ Jasa				1,235,450,600			1,235,450,600			
Bagian Umum				44,703,731,304			44,703,731,304			
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				1,728,506,500			1,728,506,500			
Bagian Organisasi				1,381,540,516			1,381,540,516			
TOTAL				84,962,236,054	250,000,000		85,212,236,054			

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

Pelaksanaan perubahan rencana kerja ini berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan pelaksanaan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku.

Dengan tersusunnya perubahan rencana kerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal.

Tasikmalaya, 11 Nopember 2022



SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H.IVAN DICKSAN HASANNUDIN, M.Si.
NIP. 19660703 199603 1 002